# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Tinjauan Pustaka

### 2.1.1 Pengertian Partisipasi

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa. Maka dari itu penulis akan menguraikan definisi partisipasi yang menurut Inu Kencana Syafiie, sebagai berikut :

> "Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama" (Syafiie, 2002: 132).

Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut. Selain itu Ramlan Surbakti juga memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut :

> “Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1999: 140).

Dari pendapat di atas, dapat dikatakan partisipasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pelaksanaan demokrasi yang mempunyai peranan penting . Pelaksanaan demokrasi dapat menentukan keputusan politik baik itu kebijakan, peraturan dll. Apabila ada kebijakan yang tidak berpihak/merugikan masyaraka, masyarkat mempunyai hak untuk memberikan pendapat/melakukan protes berupa aksi unjuk rasa karena apa yang akan dibuat dan dilaksanakaan pemerintah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Sementara itu menurut Hutington partisipasi adalah:

> “Partisipasi itu dapat bersifat perorangan atau secara kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif.” (Huntington 1977:42.4).

Berdasarkan pendapat di atas yang di maksud dengan partisipasi yaitu: partisipasi pada umumnya bersifat perorangan yaitu tanpa bergabung dan terpengaruh oleh suatu partai politik/kelompok kepentingan sehingga partisipasi yang dilakukan murni keinginan pribadi tanpa ada dorongan/paksaan dari pihak manapun. Sedangkan partisipasi secara kelompok yaitu partisipasi yang dibentuk dalam suatu organisasi secara baik-baik tanpa adanya kekerasan dalam bentuk apapun.

Definisi lain dikemukakan oleh Mubyarto bahwa mendefinisikan:

> "Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri." (Mubyarto, 1980 :35)

Menurut pendapat diatas partisipasi adalah situasi dimana masyarakat bersedia untuk membantu program yang telah dibuat oleh pemerintah secara sukarela dengan mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan kata lain masyarakat selalu mendukung program/kebijakan pemerintah selama demi kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat.

Pendapat berbeda yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian membagi partisipasi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi tidak aktif, yaitu:

> "Partisipasi itu ada yang aktif dan ada yang pasif. Partisipasi pasif dapat berupa sikap, perilaku, tindakan, rakyat tidak melakukan hal-hal yang dapat menghalangi kelancaran pembangunan nasional."(Siagian,2008 : 55 )

Menurut uraian diatas bahwa partisipasi terdapat dua jenis diantaranya partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang selalu menerima apapun kebijak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan partisi aktif masyarakat cenderung aktif dalam menyampaikan pendapat apabila tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, maka masyarakat bisa melakukan berbagai aksi misalnya demonstrasi.

Sedangkan Winardi mengemukakan pengertian partisipasi sebagai berikut:

> "Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsihnya kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana dilibatkan pribadi orang yang bersangkutan, melaksanakan tanggungjawabanya untuk melakukan hal tersebut.". (Winardi,2000:64).

Menurut pendapat diatas partisipasi yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berupa emosianal berupa perasaan/dugaan dalam menghadapi suatu masalah , tetapi juga dapat berupa mental berarti perilaku/sikap dalam memberikan kontribusi terhadap pembuatan suatu kebijakan haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Seseorang yang terlibat dalam pembuatan keputusan harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia buat sehingga tujuan dapat tercapai.

### 2.1.2 Pengertian Politik

Secara etimologis politik dari bahas Yunani "*Polis*" yang artinya sama dengan kota (*City*) ataunegara kota (*City State*) dari polis timbul istilah lain *polite* artinya warga negara, *politicos* artinya kewarganegaraan, *politike techen* artinya kemahiran berpolitik, dan selanjutnya orang-orang romawi mengambil istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.

> "Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. "
> (Surbakti, 1999 : 1)

Menurut pendapat di atas dapat dikatakan bahwa politik adalah salah satu sarana interaksi atau komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah harus bisa mendengarkan dan memenuhi kebutuhan msyarakat sehingga apapun program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat dimana tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai dengan baik.

Menurut F. Isjwara, politik adalah : "salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tekhnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan". (Isjwara, 1995 : 42) . Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangankan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan. itu demi tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Kartini Kartono bahwa

> "Politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat." (Kartono , 1996 : 64)

Berdasarkan pendapat tersebut maka politik adalah proses penegakan peraturan dalam suatu Negara dengan menggunkan kekuasaan untuk membuat keputusan ditengah – tengah masyarakat. Dalam meenegakkan peraturan tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan tidak bisa mengedepankan kepentingan pribadi/kelompok, tetapi harus mengedepankan kepentingan umum.

Berbeda dengan Kartono, Rod Hague berpendapat bahwa :

> "Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya."(Rod Hague,2001 : 78).

Pendapat Rod Hague tersebut menjelaskan bahwa politik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa secara kolektif dan bersifat mengikat dengan tujuan menyatukan perbedaan yang ada dalam kelompoknya. Dengan disatukannya perbedaan dalam kelompok maka kelompok tersebut akan membuat suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Sementara itu Mirriam Budiardjo mengemukakan bahwa politik adalah sebagai berikut :

> "Politik adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu sistem politik (negara) yg menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu." (Budiardjo,2008:64).

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiata, dapat berpa pemilihan umum, kampanye, mencalonkan diri menjadi pemimpin/pejabat pemerintahan dalam suatu negara. Kegiatan tersebut harus melalui suatu proses. Salah satu proses tersebut yaitu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang di dapat melalui proses pemilihan umum. Sehingga dapat menentukan tujuan dalam sistem politik Indonesia dan dapat mencapai tujuan bersama.

### 2.1.3 Partisipasi Politik

Pelaksanaan partisipasi dari warga negara/masyarakat dalam salah satu contoh keputusan yang dibuat oleh pemerintah yakni pemilihan umum di tingkat pusat dan di tingkat desa disebut pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo yaitu:

> "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah." (Budiardjo, 2008:367).

Menurut teori diatas partisipasi politik adalah kegiatan memilih pimpinan suatu Kepala Negara maupun Kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pemilihan tersebut diharapkan masyarakat baik individu maupun kelompok dapat menyampaikan pendapatnya melalui partisipasi politik. Kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Mirriam budiardjo mengemukakan bahwa partisipasi politik meliputi :

Pertama , pemberian suara dalam pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik yang paling luas tersebar. Dewasa ini pemberian suara terdapat hampir di semua sistem politik baik yang demokratis maupun yang otoriter. Tujuan pemberian suara antara lain untuk memilih secara langsung badan legislatif ataupun eksekutif . pemberian suara pada pemilihan umum meliputi

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang meliputi proses pemberian suara , mengikuti sosialisasi, kendala dan fasilitas yang disediakan dalam pemberian suara

1. Proses memberikan suara adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. (Indonesia Pemilu,08/01/2008).
2. Mengikuti sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan sesorang dalam proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam masyarakat (Ihromi, 1999; 75)
3. Kendala adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. (Kuswohardyanto, 24/06/2009).
4. Fasilitas adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, tugas, dan sebagainya. (Salim,2005:415).

Kedua, menghadiri rapat umum adalah suatu bentuk partisipasi yang dapat terjadi secara formal . rapat merupakan partisipasi politik yang sebentar-sebentar, adalah bentuk diskusi-diskusi oleh individu-individu dalam keluarga masing-masing, ditempat kerja atau diantara sahabat-sahabat maupun secara formal yang meliputi : diskusi formal di tingkat kota maupun provinsi dan lokasi diskusi.

1. Diskusi Formal adalah Diskusi ini terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan atau semi pemerintahan, dimana dalam diskusi itu perlu adanya ketua dan penulis serta pembicara yang diatur secara formal, contoh: sidang DPR . (Abu Ahmadi, 1986: 114).
2. Lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006:87).

Ketiga, Hubungan dengan pejabat Pemerintah adalah melakukan hubungan dengan pejabat pemerintah mengenai komunikasi individual dengan pejabat pemerintah sebagai rambu-rambu partisipasi politik. Kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan politik Kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan dengan melalui prosedur yang wajar (*konvensional*) dan tidak berupa kekerasan (*non violence*) yang meliputi komunikasi secara langsung,menjadi tim sukses dan melakukan  demonstrasi.

1. Komunikasi adalah  : Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.( Dedy Mulyana, 2005 : 62*)*

2. Tim sukses adalah tim yang dibentuk agar pada penyelenggaraan pemilihan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terpilih dan menang dalam Pilkada. Tim Sukses juga dapat dikatakan sebagai Tim Pemenang atau Tim Kampanye. Adapun yang dimaksud dengan Tim Sukses adalah organisasi yang dibentuk dengan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai dengan kebutuhan dan hasilnya dapat terukur. (Reni Arisani, 13/08/2008).
3. Demonstrasi adalah : adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. (Rachmat Hidayat, 05/11/2012).

Keempat, menjadi anggota Partai Politik adalah suatu kegiatan yang dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, karena melalui kelompok ini anggota-anggota masyarakat dapat mengeluarkan berbagai gagasan dan mempertahankannya lewat sistem politik yang bersangkutan yang meliputi menjadi partisan, simpatisan dan kendala.

1. Partisan adalah:  Perilaku yang memberikan pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang dari luar lingkungannya. (Bedjo, 2000:08)

2. Simpatisan adalah : proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Dorongan utama pada Simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. (Gillin, 2009:11).

Berdasarkan pendapat di atas partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilh. atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara maupun kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Selain masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih dan dipilih patisipasi juga dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat umum yang diadakan oleh suatu lembaga pemerintahan/ lembaga formal untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah politik/pemerintahan yang terjadi di masyarakat.

Untuk dapat mempengaruhi kebijakan partisipasi politik juga dapat dilakukakn dengan cara mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan untuk mengajukan suatu kebijakan. Hubungan tersebut dapat dilakukan secara langsung (*Face to face)* dengan cara persuasif. Atau dapat juga dilakukan dengan cara melakukan aksi unjukrasa/demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pejabat pemerintah.

Bentuk partisipasi yang terakhir menurut Mirriam Budiardjo yaitu dengan bergabung/menjadi anggota suatu partai politik karena partai politik merupakan salah satu saran untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain

itu partai politik juga memiliki fungsi untuk merekrut masyarakat untuk dapat mencalonkan diri menjadi wakil kepala daerah.

Sementara itu Bentuk – bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond secara konvensional :

a. Pemberian suara (*voting*)
b. Diskusi politik
c. Kegiatan kampanye
d. Membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan
e. Komunikasi individu dengan pejabat politik/administratif
f. Pengajuan petisi
g. Berdemonstrasi
h. Konfrontasi
i. Mogok
j. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : perusakan, pemboman, pembakaran. (Almond,1966:45).

Dari teori diatas dapat diketahui bahwa pemberian suara (*voting)* merupakan bentuk partisipasi politik yang paling mudah untuk dapat dilakukan oleh masyarakat. Pemberian suara ditempatkan oleh Almond diurutan pertama karena pemberian suara dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik yang rendah dan paling banyak diikuti.

Sementara itu menurut Huntington :

> "Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi-mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif."
> (Hutington, 1977 : 55)

Berdasarkan pendapat diatas partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat secara individu maupun kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah.

Cara mempengaruhi tersebut dapat dengan cara terorganisir, damai maupun dengan cara kekerasan baik yang legal maupun illegal.

Mempengaruhi dengan cara terorganisir dan damai salah satunya dengan berpartisipasi dalam rapat umum maupun dalam pemilihan kepala daerah dengan cara memberikan suara. Adapun dengan cara kekerasan dapat berupa demonstrasi maupun kegiatan anarkisme lainnya.

Adapun menurut Norman H.Nie dan Sidney Verba berpendapat bahwa partisipasi politik adalah sebagai berikut :

> " Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka." (H.Nie &Verba, 1972 : 9).

Berdasarkan teori diatas partisipasi politik dapat dikatakan sebagai kegiatan warganegara untuk mempengaruhi kebijakan dan pemilihan pejabat Negara yang dilakukan secara legal oleh individu/pribadi warga Negara.

Sementara itu menurut Soemarsono dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Politik* adalah:

> "Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. Atau dengan perkataan lain, partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (*individual reference, social references*) yang berwujud dalam aktivitas sikap dan prilaku" (Soemarsono, 2002:4.5).

Bertolak dari pendapat di atas bahwa formulasi simbol-simbol merupakan faktor terpenting dalam komunikasi baik dilihat secara pribadi maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Politik* bahwa "Partisipasi politik ialah: keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik." (Rush dan Althoff: 1992: 124).

Menurut pendapat Althoff tersebut bahwa individu terlibat dalam macam-macam tingkatan dalam system politik. Macam-macam tingkatan tersebut bisa saja setiap individu dapat berpartisipasi mulai dari tingkat politik terendah seperti Desa hingga terlibat dalam skala nasional seperti mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu menurut Rafael Raga Maran dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Sosiologi Politik* bahwa:

> "Partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalanya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara. Dalam hal ini, partisipasi politik berbeda dengan mobilisasi politik, yaitu usaha pengerahan masa oleh golongan elite politik untuk mendukung kepentingan-kepentingannya" (Maran, 1999:147).

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi politik sebagai usaha yang terorganisir atau tersusun rapi oleh warga negara atau masyarakat dalam memilih semua pemimpin-pemimpin yang akan menduduki pemerintahan serta dapat berpengaruh pada semua kebijaksanaan umum. Dalam hal ini partisipasi politik

bukan merupakan mobilisasi politik yang dapat menggerakkan masyarakat yang diinginkan para elit politik, sehingga dapat mendukung semua keinginan-keinginan dari para elit politik tersebut.

Selanjutnya penulis akan mendefinisikan partisipasi politik menurut Kevin R. Hardwick menyatakan bahwa :

> "Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut." ( Hardwick, 2004:185).

Menurut pendapat di atas, partisipasi politik merupakan usaha dari warga negara untuk mempengaruhi pemimpin pemerintahan serta adanya interaksi warga negara dengan pemerintah dalam menyampaikan semua kepentingan atau keinginan yang dibutuhkan oleh warga negara yang disampaikan pada pemerintah, sehingga kepentingan atau keinginan tersebut dapat terlaksana.

Menurut Herbet McClosky partisipasi politik dapat diartikan sebagai :

> "kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum." (McClosky, 1972:90).

Berdasarkan teori diatas partisipasi politik adalah kegiatan dimana masyarkat memilih secara sukarela dalam proses pemilihan penguasa dan secara tidak langsung memberikan suara dalam proses pembentukan kebijakan umum.

### 2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhbi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini.

Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang.

1. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.
2. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. (Surbakti, 1999 : 15).

Menurut pendapat tersebut aspek kesadaran politik meliputi kesadaran hak dan kewajiban warga Negara seperti : hak dan ewajiban politik masyarakat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam pemilu dan berkewajiban mengikuti pemilu, hak ekonomi masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan finansial dan berkewajiban membayar pajak, hak mendapatkan jaminan social masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dan berkewajiban turut serta dalam menjamin kesejahteraan sosial.

Selain itu masyarakat juga berhak untuk berpartisipasi dalam penilaian program dan kebijakan pemerintah. Penilaian tersebut diharapkan mampu mengontrol jalannya proses pelaksanaan pemerintahan seperti kebijakan dalam aspek pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan program yang telah direncanakan sehingga tujuan dapat tercapai.

Weimer dan Aidan menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

1. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misainya kaum buruh, para, pedagang dan pars profesional.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan- tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah.

4. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang sating memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cars mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.” (Weimar,1992:44).

Menurut pendapat diatas, yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yaitu : modernisasi dalam segala bidang baik dari segi social, ekonomi dan budaya. Perubahan struktur kelas menengah dan pekerja dalam dunia indutri, adanya pengaruh kaum intelektual yang mengeluarkan ide nasionalisme, liberalisme dll. Banyaknya konflik pemimpin-pemimpin politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan terjadi pemakzulan dikalangan elit politik, dan meluasnya keterlibatan pemerintah dalam urusan social, ekonomi dan kebudayaan yang diawasi melalui lembaga atau badan-badan sampai kepada tingkat daerah.

Milbrath memberikan 3 faktor bervariasinya partisipasi politik seseorang.

1. Berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Keterbukaan dan kepekaan seesorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Meskipun demikian dalam menanggapi perangsang-perangsang politik itu tentu dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, nilai-nilai, pengalaman dan kepribadian yang dimiliki seseorang.
2. Berkenaan karakteristik sosial seseorang. Status sosial ekonomi, karakteristik suku, jenis kelamin, usia keyakinan agama merupakan karakteristik sosial yang berpengaruh terhadap partisipasi politik seseorang dalam politik.
3. Menyangkut sifat dan sisetm politik dan partai tempat seseorang itu berada. Seseorang yang hidup dalam negara-negara demokratis, partai-partai politik cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa. Karena itu massa cenderung berpartisipasi dalam politik. (Milbrath, 1977:45)

Berdasarkan teori tersebut menyebutkan bahwa media massa mampu memberikan pengaruh yang sangat besar dalm dunia politik. Selain itu beberapa faktor seperti : suku, jenis kelamin, usia dan agama juga dapat mempengaruhi partisipasi politik seseorang. Dalam teori ini partai politik juga mempunyai

peranan penting karena dapat memperjuangkan kepentingan massa sehingga massa cenderung ingin berpartisipasi dalam dunia politik.

Sementara itu Arbi Sanit menyebutkan ada 5 faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia. Yaitu :

1. Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik.
2. Adanya kenyataan berpolitik secara lugas dan terbuka.
3. Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.
4. Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.
5. Adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan. (Arbi sanit, 1999:89)

Berdasarkan pendapat diatas, faktor-faktor yang mendorong partisipasi politik adalahn: adanya kebebasan berkompetisi, kenyataan berpolitik, keleluasaan mengatur diri dan mengatur partai politik, sumber daya masyarakat yang berkompeten dibidang politik dan kekuasaan yang seimbang.

### 2.1.5 Pengertian Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat)

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997

> "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental."

Menurut Undang – undang diatas dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas (penyandang cacat) merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik ataupun mental. Penyandang disabilitas terdiri dari: penyandang cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan mental. Penyandang cacat fisik yaitu penderita tuna netra, tuna rungu, tuna daksa. Cacat mental yaitu: tuna grahita.

Sedangkan penyandang Cacat fisik dan mental yaitu seseorang yang mempunyai keterbatasan mental sekaligus keterbatasan fisik.

## A. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Menurut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :

### 1. Penyandang Cacat Fisik

#### a. Tuna Netra

Berarti kurang penglihatan. Keluarbiasaan ini menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

#### b. Tuna Rungu/ Wicara

Tuna Rungu, ialah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. sedangkan Tuna Wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

#### c. Tuna Daksa

Secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit epilepsy (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta yang mengalami amputasi.

### 2. Penyandang Cacat Mental

#### a. Tuna Laras

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

#### b. Tuna Grahita

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ.

**3. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda)**

**a. Tuna Ganda**

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Menurut Undang – undang diatas penyandang disabilitas diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu : penyandang cacat fisik yang terdiri dari penyandang tuna netra yaitu orang yang mengalami gangguan pada penglihatan/tidak bisa melihat. Tuna rungu/tuna wicara yaitu orang yang mengalam gangguan pada pendengaran dan cenderung tidak bisa berbicara. Selain itu ada juga penyandang tuna daksa yaitu orang yang mengalami kerusakan/kehilangan bagian tubuhnya, salah satunya akibat amputasi/sejak lahir.

Penyandang cacat mental yang terdiri dari penyandang tuna laras dan tuna grahita yaitu orang yang mempunyai gangguan pada emosi dan kemampuan *intelegent question (IQ)* dibawah normal/dibawah rata-rata orang biasa. Klasifikasi yang terakhir yaitu tuna ganda. Tuna ganda adalah orang yang mempunyai keterbatasan fisik sekaligus keterbatasan mental. Diantaranya tuna runggu sekaligus menderita tuna wicara.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam suatu Negara. Karena merupakan salah satu bentuk untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikut sertaan sesorang dalam berbagai kegiatan politik.

Miriam Budiardjo mengemukakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah.

Pemilihan umum berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2013 , Dalam pilgub tersebut penyandang disabilitas khusunya penyandang cacat fisik turut berpartisipasi dalam memilih gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat dengan mengikuti proses pemilihan gubernur, mengikuti sosialisasi yang tidak terlepas dari kendala sehingga diberikan fasilitas khusus. Pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang paling banyak diikuti oleh masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses perkembangan politik.

Selain mengikuti pemilihann umum menghadiri rapat umum juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Kegiatan rapat umum biasanya berbentuk diskusi formal yang berlokasi di instansi pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti oleh setiap kalangan dan

semua lapisan masyarakat ternasuk penyandang cacat fisik berhak mengikuti diskusi formal bersama pejabat pemerintahan.

Pejabat pemerintahan harus mampu berhubungan baik dengan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, hubungan yang terjadi dapat melalui komunikasi secara langsung, menjadi tim sukses ataupun melakukan demonstrasi.. Membina hubungan baik antara pemerintah dan penyandang disabilitas diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Salah satu wadah untuk dapat membuat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yaitu bergabung dengan partai politik. Partai politik sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik. Dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutment dan  pendidikan politik Partai politik diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi dan mewakili penyandang disabilitas untuk terlibat dalam partai baik sebagai simpatisan maupun sebagai partisan dan dengan kendala yang dihadapi, tetapi di Kota Bandung belum ada partai politik yang melibatkan penyandang disabilitas menjadi anggota/kader partai.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur adanya kuota 1 (satu) persen bagi

penyandang cacat dalam ketenagakerjaan, artinya ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pegawai. jumlah penyandang cacat di Kota Bandung hingga kini mencapai 10.200 orang.

Penyandang disabilitas dapat dikategorikan sebagai orang yang mengalami gangguan-gangguan sebagaimana berikut : gangguan kejang (ayan), gangguan belajar, gangguan wicara (Tuna Rungu), gangguan pendengaran, gangguan penglihatan (Tuna Netra), gangguan gerak, gangguan perkembangan, gangguan tingkah laku, gangguan mati rasa, dan gangguan lain-lain. Gangguan tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam berpartisipasi politik, penyandang disabilitas jarang dilibatkan seperti menjadi anggota partai politik, dll.

Partisipasi politik adalah hak masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan – kegiata politik seperti : ikut serta dalam pemilihan umum , mengikuti rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan, bergabung dengan partai politik dll.

Partai politik sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat. Keberadaan partai politik di Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan partai politik bagi penyandang disabilitas salah satunya dengan melibatkan penyandang disabilitas menjadi kader partai.

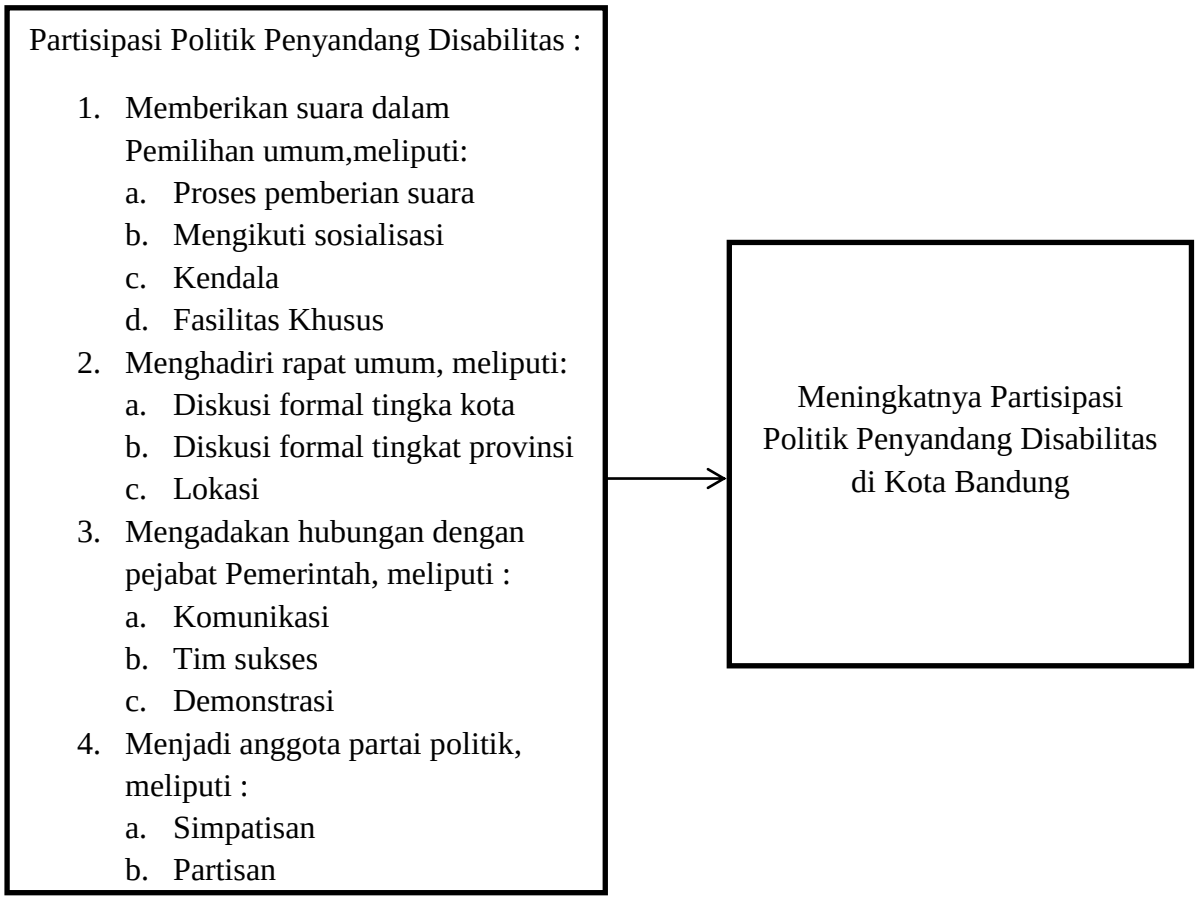
Partai politik di Kota Bandung yang tergabung dalam koalisi pilgub Jabar tahun 2013, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera

(PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

Partai politik tersebut, diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh masyarakat Kota Bandung, salah satunya mengikut sertakan penyandang disabilitas menjadi kader partai dan meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat model kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Bagan. 2.1**
**Model Kerangka Pemikiran**



Dari model kerangka pemikiran diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi politik penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik dapat dilihat dari memberikan suara dalam pemilihan umum ,menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah dan menjadi anggota patai, dengan faktor – faktor tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Bandung.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Partisipasi politik adalah keikut sertaan penyandang disabilitas khususnya penyandang cacat fisik dalam kegiatan-kegiatan politik tanpa ada tekanan dari siapapun.
b. Penyandang disabilitas yaitu sekelompok orang/ sekelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik yang mempunyai hak memilih dan dipilih di Kota Bandung.
c. Partisipasi Politik penyandang disabilitas adalah : kegiatan politik yang dilakukan penyandang disabilitas di Kota Bandung yang meliputi :
    a. Memberikan suara dalam Pemilihan Umum adalah kegiatan memberikan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2013 di Kota Bandung. Yang meliputi :
        a) Proses memberikan suara pada pilgub Jabar adalah : serangkaian kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung untuk memberikan suara pada pilgub Jabar tahun 2013.

b) Mengikuti Sosialisasi adalah : Kegiatan yang diikuti penyandang disabilitas Kota Bandung untuk mengetahui proses dan tatacara dalam pilgub Jabar tahun 2013.

c) Kendala adalah : hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas Kota Bandung dalam pilgub Jabar tahun 2013 berupa akses yang belum memadai dan fasilitas yang belum maksimal.

d) Fasilitas Khusus adalah : sarana-prasarana yang disediakan khusus bagi penyandang disabilitas Kota Bandung dalam pilgub Jabar tahun 2013 berupa surat suara *braille (template)* dan pendamping bagi tuna netra.

b. Menghadiri rapat umum adalah kegiatan berkumpul disuatu tempat yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung dengan pejabat pemerintahan maupun dari lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Untuk membahas suatu masalah secara bersama-sama guna mencapai tujuan bersama, yang meliputi :

a). Diskusi Formal ditingkat Kota Madya adalah : kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung guna membahas masalah atu fenomena yang terjadi diwilayah Kota Bandung dengan lembaga-lembaga, Organisasi masyarakat, maupun dengan pejabat pemerintahan di wilayah Kota Bandung seperti Walikota, anggota DPRD Kota Bandung dan Kantor KPU.

b). Diskusi Formal ditingkat Provinsi adalah : kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung guna membahas masalah atu fenomena yang terjadi diwilayah Provinsi Jawa Barat dengan lembaga-lembaga, Organisasi masyarakat, maupun dengan pejabat pemrintahan di Provinsi Jawa Barat seperti Gubernur, anggota DPRD Jawa Barat, dan Kantor KPU.

c). Lokasi adalah : tempat dilaksanakannya diskusi formal yaitu dinas sosial, dinas perhubungan, dan DPRD Kota Bandung maupun DPRD Jawa Barat dan Kantor KPU.

d. Mengadakan hubungan dengan pejabat Pemerintah adalah interaksi penyandang disabilitas dengan pejabat pemerintah Kota Bandung, yang meliputi :

a) Komunikasi adalah : interaksi secara langsung antara penyandang disabilitas Kota Bandung dengan pejabat Pemerintahan di wilayah Kota Bandung.
b) Menjadi tim sukses adalah : tindakan yang dilakukan penyandang disabilitas dalam mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jabar tahun 2013.
c) Demonstrasi adalah : kegiatan yang dilakukan penyandang disabilitas Kota Bandung dalam menentang maupun menyampaikan pendapat kepada pemerintah Kota Bandung.

e. Menjadi anggota partai adalah adalah keikutsertaan penyandang disabilitas yang sudah mempunyai hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum menjadi anggota suatu partai politik.

   a). Penyandang disabilitas sebagai simpatisan dalam keanggotaan suatu kelompok kepentingan, organisasi social masyarakat atau partai politik adalah: tindakan yang diakukan penyandang disabilitas tetapi tidak menjadi kader/anggota.

   b). Penyandang disabilitas sebagai partisan dalam keanggotaan suatu kelompok kepentingan, organisasi social masyarakat atau partai politik adalah: tindakan dimana penyandang disabilitas terlibat secara langsung dengan menjadi anggota.

f. Kota Bandung adalah : Lokasi/wilayah dimana penyandang disabilitas berpartisipasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik speerti memberikan suara pada pemilihan gubernur, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan dan bergabung dengan partai politik.